



Memperkuat Jaring Pengaman dan Mobilitas Ekonomi Masyarakat Rentan Miskin dan Calon Kelas Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Oleh :

M. Arliyan Syahril, M.Pd,
Herry Azhar Pradana, S.E., M.B.A,
Ary Wibawa, S.AP., M.AP,
Hairul Ikhwan, S.Hut,
Yunita Anggeriana, S.Hut,
Dicky Maulana, S.Kom,
Muhammad Rifqian Nafi, A.Md.T.

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan mencatat penurunan tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir, namun capaian ini menyembunyikan persoalan struktural yang lebih serius: membesarnya kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah yang rapuh. Kelompok ini berada tepat di atas garis kemiskinan, memiliki pekerjaan tidak stabil, sangat tergantung pada sektor informal, dan mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi, inflasi, bencana, atau krisis kesehatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Namun dinamika terbaru menunjukkan perubahan karakter kemiskinan: jumlah penduduk miskin menurun, tetapi kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Kondisi ini menandakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial massal mulai mencapai batas efektivitasnya. Kelompok yang tersisa merupakan kelompok miskin kronis yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi, produktif, dan berkelanjutan.

Policy brief ini menawarkan kerangka strategis sebagai cetak biru program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2025–2030. Fokus utama diarahkan pada pergeseran paradigma dari pengurangan jumlah kemiskinan menuju pengurangan kedalaman dan ketimpangan kemiskinan melalui pendekatan livelihood, peningkatan produktivitas ekonomi desa, serta integrasi data berbasis satu identitas.

LATAR BELAKANG DAN KONTEKS KEBIJAKAN

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami transformasi struktural. Pada fase awal pembangunan daerah, kebijakan sosial seperti bantuan pangan, subsidi rumah tangga, dan perluasan layanan dasar berperan besar dalam menekan angka kemiskinan. Namun perubahan indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa strategi berbasis distribusi bantuan tidak lagi cukup untuk menurunkan kedalaman kemiskinan. Beberapa karakteristik penting kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini meliputi:

1. Sebagian besar penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah.
2. Biaya hidup yang meningkat menyebabkan jarak pengeluaran kelompok miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.
3. Ketimpangan di antara kelompok miskin meningkat, menunjukkan adanya kelompok miskin kronis yang sulit terangkat.

Situasi ini menuntut perubahan pendekatan kebijakan dari welfare-oriented menuju livelihood-oriented

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, evaluasi indikator kesejahteraan memperlihatkan bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung meningkat. Kondisi ini menandakan terjadinya pergeseran karakter kemiskinan, di mana jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi kelompok yang tersisa semakin rentan dan didominasi kemiskinan kronis.

Permasalahan utama terletak pada ketergantungan rumah tangga miskin pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, meningkatnya biaya hidup, serta keterbatasan program pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya menasar peningkatan pendapatan jangka panjang. Selain itu, fragmentasi data sasaran turut memengaruhi ketepatan intervensi kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan periode 2025–2030 perlu bergeser dari pendekatan berbasis bantuan sosial menuju pendekatan berbasis penguatan mata pencaharian (livelihood-oriented). Fokus kebijakan tidak hanya pada penurunan persentase kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan kedalaman dan ketimpangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas ekonomi desa, transformasi pertanian bernilai tambah, integrasi perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, serta intervensi yang lebih presisi berbasis rumah tangga.

Dengan pendekatan yang produktif, terarah, dan berkelanjutan, diharapkan mobilitas ekonomi masyarakat rentan dapat meningkat dan sistem ekonomi lokal menjadi lebih inklusif serta resilien.

DIAGNOSA MASALAH STRATEGIS

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dibagi dalam tiga fase utama:

- Fase Reduksi (2018–2021): Penurunan jumlah penduduk miskin melalui ekspansi bantuan sosial dan stabilisasi konsumsi rumah tangga.
- Fase Stabilisasi (2022–2024): Penurunan kemiskinan mulai melambat dan indikator kedalaman kemiskinan berfluktuasi.
- Fase Struktural (2025–sekarang): Jumlah kemiskinan rendah tetapi kemiskinan yang tersisa semakin dalam dan timpang.

Akar Permasalahan:

- Ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dengan nilai tambah rendah.
- Program pemberdayaan ekonomi masih berskala kecil dan belum menysasar kelompok miskin kronis.
- Pendekatan kebijakan masih berorientasi pada jumlah penerima bantuan, bukan perubahan pendapatan jangka panjang.
- Fragmentasi data sasaran yang mengurangi ketepatan intervensi.

TUJUAN KEBIJAKAN 2025-2030

Fokus dari program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan idealnya terfokus pada tiga tujuan strategis utama:

1. Menurunkan kedalaman kemiskinan melalui peningkatan penghasilan rumah tangga miskin.
2. Mengurangi ketimpangan antar kelompok miskin dengan intervensi yang lebih terarah.
3. Membangun sistem ekonomi lokal yang inklusif dan produktif.

Indikator keberhasilan tidak hanya berfokus pada persentase kemiskinan, tetapi juga pada penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

ARAH STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman, tetapi harus diintegrasikan dengan program peningkatan penghasilan. Setiap keluarga penerima manfaat perlu memiliki rencana peningkatan ekonomi yang jelas.

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Desa, Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

- Pengembangan koperasi produksi berbasis komoditas lokal.
- Dukungan alat produksi pertanian skala kecil.
- Hilirisasi produk pertanian melalui pengolahan sederhana di tingkat desa.

Intervensi Berbasis Rumah Tangga (Precision Policy), Pendekatan baru yang perlu diterapkan adalah pendampingan individual bagi rumah tangga miskin kronis melalui:

- Coaching usaha mikro melalui pendampingan Inkubator Bisnis
- Pelatihan keterampilan spesifik
- Akses pembiayaan mikro berbasis kelompok.

Kebijakan Pengendalian Biaya Hidup, Upaya menekan biaya hidup dapat dilakukan melalui:

- Stabilisasi harga pangan lokal
- Peningkatan akses transportasi desa
- Program energi terjangkau bagi petani dan nelayan kecil.

DESAIN PROGRAM PRIORITAS

Pilar 1: Program Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Miskin

- Bantuan aset produktif berbasis kebutuhan lokal.
- Inkubasi usaha mikro desa.
- Skema koperasi produksi dan pemasaran.

Pilar 2: Transformasi Pertanian Produktif

- Modernisasi alat pertanian skala kecil.
- Diversifikasi komoditas bernilai tambah.
- Pelatihan manajemen usaha tani.

Pilar 3: Perlindungan Sosial Adaptif

- Integrasi bansos dengan program peningkatan kapasitas ekonomi.
- Graduasi bertahap dari penerima bantuan menuju pelaku usaha.

Pilar 4: Infrastruktur Ekonomi Desa

- Peningkatan konektivitas antar desa.
- Dukungan logistik pasar lokal.
- Penguatan rantai distribusi pangan.